

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan kemunculan reinterpretasi konstitusi dari pasal 9 menjadikan pengurangan pembatasan konstitusional kepada pasukan Jepang dalam bertindak di luar negeri atau praktik *Collective Self-Defense* yang menjadikan perubahan arah kebijakan luar negeri dan citra yang dihasilkan dari pasifisme proaktif. Perubahan penyebaran dari defensif kepada pasifisme proaktif yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat internasional sehingga menyebabkan permasalahan internal negara dan perubahan strategi dari Jepang dalam membangun citra internasional.

Hadirnya Pasifisme sejak Jepang bekerjasama dengan Amerika Serikat yang dimulai karena *Yoshida Doctrine*. Tujuan Perdana Menteri Yoshida adalah untuk memfokuskan semua cara yang tersedia pada pemulihan ekonomi. Kemudian terdapat perubahan arah yang dimulai karena *Fukuda Doctrine* yang mengutamakan penggunaan Official Development Assistance (ODA) sebagai instrumen utama politik luar negeri atau disebut checkbook diplomacy. Doktrin itu dianggap sebagai janji penguatan ikatan politik dan ekonomi yang telah menimbulkan jalinan vested interest yang tidak mudah diurai.

Perubahan kebijakan politik luar negeri pasifisme proaktif telah dilakukan Jepang oleh perdana menteri Shinzo Abe, khususnya pada tahun 2012-2020. Dalam menyikapi dilemma dengan China, Jepang melakukan strategi pertahanan melalui

aliansi utamanya yaitu Amerika Serikat beserta bilateral negara lain seperti Vietnam, Filipina, Australia dan India. Kemudian hubungan internasional Jepang dan Korea Utara dalam hal isu nuklir, Jepang murni hanya langkah pengamanan yang dilakukan dengan upaya diplomasi. Kemudian melihat politik global yang kian memanas, Kementerian Pertahanan Jepang tahun 2020 meningkatkan persepsi tentang keadaan darurat dan kedekatan keamanan nasional Jepang. Dalam mencapai keberhasilan taktik untuk mendukung postur luar negeri Jepang yang akan diperlihatkan kepada negara lain. Terdapat beberapa faktor penghambat yang hanya bisa diselesaikan dengan kerjasama diplomasi pertahanan. Faktor tersebut antara lain anggaran yang terbatas, akademi militer yang tidak berkembang secara material untuk penelitian, JSDF yang memerlukan pelatihan bersama agar mendapatkan pengalaman.

Dalam teori Neo Realisme yang dikembangkan Andrew, terdapat 3 pendekatan kerjasama diplomasi pertahanan dan ketiganya dilakukan oleh Jepang. Pertama, pembangunan kepercayaan dijalin Jepang dalam bentuk kerjasama dengan mitra strategisnya. Kedua, pembangunan fasilitas pertahanan sehingga tercipta perkembangan secara cepat dan efisien. Ketiga, penelitian persenjataan militer untuk menunjang kapabilitas sumber daya Jepang.

Maka dari itu hipotesa yang telah disampaikan penulis terbukti bahwa Jepang melakukan perubahan pasifisme proaktif secara masif dan menggunakan diplomasi pertahanan. Terutama dengan terbentuknya forum internasional Jepang dapat menjadi negara yang mandiri secara militer karena tidak terlalu bergantung

dengan Amerika, akan tetapi tetap berkembang terhadap saingan di kawasannya. Pada akhirnya Jepang dapat menggunakan *self collective defense* dan berhasil keluar dari stigma Pasifisme dan menjadi militer secara sepenuhnya.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi pertahanan Jepang dan strateginya dalam masyarakat internasional. Sebagian besar studi dan literatur dalam konteks diplomasi pertahanan di Jepang berputar pada Shinzo Abe yang melakukan pengaruh kepada politik domestik untuk mempengaruhi parlemen. Penelitian ini berhasil memandang negara selain Amerika berperan penting dalam perkembangan militer. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Shinzo Abe berhasil menghidupkan forum-forum internasional dan aktif di dalamnya.

Namun penelitian mengenai diplomasi pertahanan dapat ditinjau dari perspektif negara lain agar melihat bahwasannya negara yang awalnya pasifisme untuk kembali kedalam militer. Studi ini berfokus pada ancaman eksternal dan bagaimana ancaman tersebut diselesaikan dengan kerjasama secara internasional. Namun demikian, Pendekatan negara lain yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjawab negara tersebut melakukan pengembangan militer terhadap kebijakan luar negerinya, tidak berfokus pada gaya kepemimpinan dan forum internasional dari tiap negara. Oleh karena itu, studi rinci dengan pendekatan eksternal negara lain akan menghasilkan kontribusi yang besar dan lebih baik pemahaman mengenai ancaman pertahanan militer Jepang.